



8 Fraksi DPRD Kalbar Setuju LKPj Pelaksanaan APBD 2018

PON-
T I
ANAK-RK.

Delapan Frak-
si DPRD Provinsi
Kalbar menyetujui
pertanggungjawaban pelak-
saan Anggaran Perencanaan
dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2018 yang berarti para
wakil rakyat ini sepakat dengan
realisasi pelaksanaan atau peng-
gunaan anggaran sepanjang 2018
lalu.

Persepsi ini terpapar dalam
Pandangan Akhir Fraksi terha-
dap laporan Badan
Anggaran DPRD Kalbar terhadap
Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda) tentang LKPj Pelaksaa-
naan ABPD Tahun Anggaran 2018,
Rabu (3/7).

LKPj APBD 2018 ini mencatat
kan total anggaran Pemprov Kalbar
Rp5,31 Triliun dengan realisasi
mencapai Rp5,66 Triliun atau 164
persen.

Sementara dari sektor Pendapa-
tan Asli Daerah (PAD) targetnya
Rp1,79 Triliun, sedangkan realisasi
Rp2,19 Triliun atau 120 persen,
naik cukup signifikan.

Pendapatan transfer target
Rp3,50 Triliun, realisasi Rp3,46

Triliun atau 98 persen. Sementara
belanja operasional Rp3,70 Triliun
atau 94 persen, belanja modal
Rp676 Miliar atau 89 persen. Be-
lanja tidak terduga terealisasi Rp1
Miliar.

Sisa Lebih Penggunaan Ang-

garan atau Silpa mencapai Rp364
Miliar. Sedangkan posisi saldo

anggaran lebih 2018, yaitu Rp212
Miliar, dengan anggaran lebih
mencapai Rp364 Miliar.

Fraksi Partai Demokrasi In-
donesia (PDI) Perjuangan, Ade
Jumhur, dalam pandangan akhir
menyatakan bahwa pihaknya
menyetujui pertanggungjawaban
APBD 2018 oleh Pemprov Kal-

bar melihat sejauh mana upaya
pemerintah untuk merefleksi-
kan pertanggungjawaban APBD
tersebut dengan baik, meskipun
ada catatan dari BPK-RI terkait
sejumlah pergeseran anggaran
yang menjadi temuan dan bera-
khir Wajar Dengan Pengecualian
(WDP).

"Kita mengapresiasi tingginya se-
jumlah kenaikan sejumlah sektor,
baik total anggaran keseluruhan
hingga PAD, sehingga fraksi kami
pun menyetujui pertanggungjawawa-
ban yang disampaikan," ujarnya.
Persepsi rancangan tentang
pertanggungjawaban APBD ini un-
tuk dietrapkan menjadi peraturan
daerah ini, bukan tanpa kajian
 mendalam. Pihaknya pun meminta
pemerintah untuk bisa lebih baik
 lagi di tahun berikutnya. Apalagi
 catatan BPK RI harus tidak terjadi
 di tahun berikutnya.

"Kita ingin WTP pada tahun
anggaran 2019 mendatang dan
ingatkan kepada pemerintah agar
menindaklanjuti temuan BPK RI
ini agar bisa dikemudian hari,
di tahun selanjutnya perbaikan
akan dilakukan sehingga tidak ada
lagi temuan-temuan yang dapat
merugikan pemerintah itu sendiri,"
 katanya.

**Reporter: Gusnadi
Redaktur: Andry Soe**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



CAPANYERAH. Pimpinan DPRD Kalbar menyerahkan Pandangan Akhir Fraksi terhadap LKPJ Pelaksanaan APBD 2018 ke Pemprov Kalbar, Rabu (3/7). **GUSNADI-RK**